

# IMPLEMENTASI TAX PLANNING DALAM UPAYA PENGHEMATAN PAJAK PENGHASILAN (PPh) BADAN (Studi Kasus Pada PT. Citra Perdana Kendedes Malang)

Indah Ayu Pusparini  
Moch. Dzulkirom AR  
Devi Farah Azizah

Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang

## *Abstract*

*Dues or taxes are incurred by mandatory contributions paid to the government to finance the State without the achievement counter directly. From the government side, the tax is a major source of state revenue. However, from the company, the tax is a burden which will reduce the company's net profit. It required effort or particular strategies by financial management to reduce the burden of tax payable. Effort or strategy undertaken as part of tax planning. The results with used the descriptive research method showed that the conditions taxation of PT. Citra Perdana Kendedes Malang still less than optimal. This is because there are components that are supposed to be used by the company to save on taxes but not utilized by the company so that the burden of the tax to be paid to be great. Hopefully with tax planning, companies can capitalize on the opportunities that exist to achieve maximum tax savings, since by doing tax planning, it is known that the PT. Citra Perdana Kendedes Malang obtain tax savings of IDR 43,269,419.00 in 2010, IDR 45,886,339.00 in 2011 and IDR 49,017,639.00 in 2012.*

**Keywords :** *tax planning, income tax*

## 1. PENDAHULUAN

Dewasa ini perkembangan dunia usaha dan perdagangan dihadapkan pada suatu kondisi persaingan yang sangat ketat. Hal ini tidak dapat lepas dari semakin banyaknya perusahaan yang tumbuh dan bergerak dibidang yang sama. Persaingan antara perusahaan ini sangat menguntungkan, karena dengan persaingan yang sehat akan semakin meningkatkan perekonomian dalam negeri. Setiap perusahaan akan selalu dituntut untuk memberikan yang terbaik bagi konsumen dan memenuhi kewajiban pada negara agar tidak tersingkir dalam dunia usaha. Oleh karena itu perusahaan dituntut mampu menggunakan sumber-sumber permodalannya seefisien dan seefektif mungkin agar tujuan dari perusahaan dapat tercapai dan kontinuitas perusahaan dapat dipertahankan.

Pada umumnya, perusahaan yang bergerak di bidang bisnis akan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan ini berguna untuk melihat posisi keuangan, kinerja perusahaan serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi yang nantinya akan berpengaruh bagi kemajuan perusahaan. Laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan terdiri dari dua macam, yaitu laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersial digunakan untuk menunjukkan jumlah laba yang

diperoleh perusahaan guna keperluan perusahaan itu sendiri, sedangkan laporan keuangan fiskal digunakan untuk perhitungan pajak perusahaan yang nantinya akan dibayarkan kepada pemerintah. Adanya laporan keuangan fiskal ini akan mempermudah perusahaan dalam menghitung besarnya pajak perusahaan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pajak merupakan pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang, dan lain-lain. Pajak yang penarikannya bersifat memaksa ini juga terdapat timbal balik berupa keuntungan yang didapat masyarakat secara tidak langsung. Sedangkan menurut Smeets dalam Waluyo dan Ilyas (2002: 5) menyatakan pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakannya, tanpa adanya kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual, dimaksudkan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa pajak adalah iuran atau kontribusi wajib yang dikeluarkan oleh masyarakat yang dibayarkan kepada pemerintah untuk pembiayaan Negara tanpa mendapat kontra prestasi secara langsung.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Pada tahun 2012, berdasarkan data dari BKF Depkeu, dari pendapatan negara sebesar 1.358,2 triliun rupiah, sebesar 1.016,3 triliun rupiah atau sekitar 74,83% dari jumlah tersebut merupakan pendapatan Negara yang diperoleh dari pajak pusat, yaitu PPh dan PPN ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)).

Dari sisi pemerintah, pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara. Namun dari sisi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih perusahaan. Untuk itu diperlukan usaha atau strategi tertentu oleh manajemen keuangan untuk mengurangi beban pajak terutang. Usaha atau strategi yang dilakukan merupakan bagian dari perencanaan pajak. Menurut Chrisdianto (2009:1) perencanaan pajak adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa, sehingga hutang pajak yang dimiliki, baik itu pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal sepanjang hal ini dimungkinkan oleh peraturan yang berlaku. Dengan demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja akan membantu *cashflow* perusahaan.

PT. Citra Perdana Kendedes, sebagai tempat penelitian merupakan sebuah wajib pajak badan yang bergerak di bidang jasa transportasi argometer (taksi) di Malang. Perusahaan telah berkembang pesat dan merupakan perusahaan jasa transportasi argometer (taksi) yang cukup terkenal di Malang. Perusahaan ini tentunya memiliki kewajiban perpajakan antara lain pajak penghasilan. Dengan pendapatan taksi sebesar Rp 4.117.617.388,00 pada tahun 2010, Rp 4.506.889.613,00 pada tahun 2011, dan sebesar Rp 4.902.239.688,00 pada tahun 2012 tentunya akan menimbulkan beban pajak penghasilan yang besar bagi perusahaan. Oleh karena pembayaran pajak penghasilan adalah suatu beban yang mengurangi laba perusahaan, maka diperlukan suatu usaha untuk melakukan perencanaan pajak yang legal dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi *Tax Planning* yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak penghasilan yang terutang dan untuk mengetahui dampak dilaksanakannya *Tax Planning* pada penghematan pajak penghasilan bagi perusahaan.

## 2. KAJIAN PUSTAKA

### 2.1. Pajak

Sejak pajak mulai diperhitungkan sebagai salah satu pemasukan paling penting bagi sebuah negara, banyak ahli ekonom mengemukakan pendapatnya tentang pengertian pajak. Berikut disajikan sejumlah pendapat para ahli mengenai pengertian pajak, seperti yang ditulis oleh Zain (2003:10-11):Adriani menyatakan pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Soemitro menyatakan pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### 2.2. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 adalah “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak bersangkutan, baik dengan nama dan dalam bentuk apapun”.

Pajak penghasilan menurut Prabowo (2004:21) mengandung dua pengertian yang disatukan dengan yang lainnya. Pengertian pertama mengenai arti pajak secara bebas dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban kenegaraan berupa pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara. Sementara penghasilan adalah jumlah uang yang diterima atas usaha yang dilakukan oleh perseorangan, badan, dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas

ekonomi seperti mengkonsumsi dan/atau menimbun serta menambah kekayaan.

Dengan demikian, secara garis besar, pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak dalam satu masa pajak.

### 2.3. Tarif Pajak Penghasilan

Tarif merupakan salah satu unsur penting dalam menghitung besarnya PPh yang terutang, karena akan mempengaruhi besar kecilnya PPh terutang yang akan dibayarkan oleh wajib pajak. Tarif PPh untuk wajib pajak adalah tarif tunggal yaitu tarif yang ditetapkan dalam Pasal 17 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, yaitu sebesar 28% pada tahun 2009 dan sebesar 25% untuk tahun 2010 dan tahun-tahun berikutnya.

Namun Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

### 2.4. Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial adalah laporan keuangan yang dibuat berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan. Menurut Suandy (2003:122), laba akuntansi atau disebut juga dengan laba komersial adalah pengukuran laba yang lazim digunakan dalam dunia bisnis. Laba akuntansi dihitung berdasarkan Prinsip Akuntansi yang diterima umum yang dimana di Indonesia diatur dalam Prinsip Standar Akuntansi Keuangan.

### 2.5. Laporan Keuangan Fiskal

Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan pada peraturan perpajakan yang digunakan untuk penghitungan pajak. Lumbantoruan (1996:67) mendefinisikan laporan keuangan fiskal adalah laporan yang disusun khusus untuk kepentingan perpajakan dengan mengindahkan semua peraturan perpajakan.

### 2.6. Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak adalah usaha yang dilakukan oleh manajemen perusahaan sebagai wajib pajak untuk meminimalisasi utang pajak

yang harus dibayarkan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh definisi yang di sampaikan oleh Zain (2003:43) bahwa "Secara garis besar, perencanaan pajak (*tax planning*) adalah proses pengorganisasian usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial".

Tjahjono dan Husein (2005:479) menyatakan langkah-langkah perencanaan pajak sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan Penghasilan yang Dikecualikan  
Usaha memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan adalah usaha memaksimalkan penghasilan yang bukan objek pajak dengan berdasarkan pada variabel penghasilan yang bukan sebagai objek pajak. Peluang ini tercantum dalam pasal 4 ayat 3 Undang-undang PPh tahun 2008.
- b. Memaksimalkan Biaya Fiskal  
Tindakan ini berupa tindakan yang dilakukan dengan meningkatkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan. Peluang ini tercantum dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Pasal 6 dan 9.
- c. Meminimalkan Tarif Pajak  
Tindakan ini dapat dilakukan dengan upaya pengenaan pajak dengan tarif seminimal mungkin. Hal ini dapat ditempuh antara lain dengan mengalokasikan penghasilan dalam beberapa tahun atau dalam beberapa perusahaan yang masih satu grup.

## 3. METODE

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Nazir (2011:54) penelitian deskriptif adalah "Suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, fluktuatif dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki".

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah:

### 1. Perencanaan Pajak

Fokus pada perencanaan pajak ini menggunakan segala informasi yang berkaitan

dengan laporan keuangan perusahaan selama periode tertentu, adapun data yang diambil meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi Komersial, Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak, dan Biaya Penyusutan. Menerapkan strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan biaya yang diperkenankan menurut undang-undang Nomor 36 Tahun 2008.

## 2. Penghematan Pajak

Melakukan rekonsiliasi atas Laporan Laba Rugi Fiskal Sebelum dan Sesudah Perencanaan Pajak sehingga diketahui penghematan pajak yang didapatkan.

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995:263), analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Adapun tahapan dalam analisis data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Pajak Menentukan besarnya pajak penghasilan.
  - a. Menentukan besarnya pajak penghasilan.
  - b. Menganalisis biaya non fiskal (*non deductible cost*) agar dapat menjadi biaya fiskal (*deductible cost*).
  - c. Menghitung komersial dan laba fiskal.
  - d. Menerapkan strategi perencanaan pajak seperti pemanfaatan biaya yang diperkenankan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 untuk meminimalisasi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.
2. Penghematan Pajak  
Membandingkan atas perhitungan pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak.

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Kesimpulan Atas Hasil Perhitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Melakukan Perencanaan Pajak

Dari data yang telah disajikan dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya perencanaan pajak telah tercapai. Hal ini terbukti dengan didukung hasil perhitungan yang menunjukkan bahwa bila dilakukan perencanaan pajak dapat diperoleh penghematan pajak sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011 dan sebesar Rp 49.017.639,00 untuk tahun 2012. Hasil ini menunjukkan jumlah yang menguntungkan perusahaan di dalam pembayaran pajak dan aktivitas perusahaan.

Penghematan pajak atas penerapan perencanaan pajak yang telah dilakukan tentunya berdampak pada performa laporan keuangan perusahaan dari segi likuiditas dan kepemilikan modal kerja perusahaan.

#### a. Likuiditas Perusahaan

Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan di dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang tersedia. Likuiditas dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio, salah satunya adalah *current ratio*, dimana rasio ini didapat dengan membandingkan besarnya aktiva lancar yang dimiliki dengan kewajiban lancar perusahaan. Semakin besar hasil pengukuran tersebut maka akan menunjukkan bahwa perusahaan yang dimiliki dalam posisi keuangan yang sehat sehingga dapat meyakinkan pihak investor untuk dapat menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Dengan adanya penghematan pajak setelah dilakukannya perencanaan pajak, maka pengeluaran kas atau biaya pajak penghasilan menjadi berkurang sehingga menambah jumlah nominal dari akun kas pada perusahaan yang berarti menambah total nilai dari jumlah aktiva lancar (*likuid*) yang dimiliki oleh perusahaan sehingga menghasilkan nilai perbandingan dari aktiva lancar semakin besar atas nilai kewajiban lancar yang dimiliki oleh perusahaan dan mengakibatkan likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan semakin besar serta mengindikasikan bahwa kondisi keuangan yang dimiliki oleh perusahaan dalam keadaan sehat.

#### b. Kepemilikan Modal Kerja Perusahaan

Modal kerja merupakan jumlah dana yang digunakan selama periode akuntansi yang dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan jangka pendek yang sesuai dengan maksud utama didirikannya perusahaan tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang jasa maupun dagang selalu membutuhkan modal kerja untuk membiayai kegiatan usahanya, dengan harapan dana yang dikeluarkan dapat kembali masuk kedalam perusahaan dalam jangka yang relatif pendek. Di dalam modal kerja, terdapat 3 (tiga) konsep yang keseluruhannya menitikberatkan kepada jumlah dana yang tersedia pada aktiva lancar, yaitu konsep kuantitatif, konsep kualitatif dan konsep fungsional. Jadi, ketika terjadi penghematan atas perencanaan pajak yang dilakukan, maka jumlah selisih atas pajak yang dikeluarkan sebelum dan setelah

dilakukannya perencanaan pajak dapat dijadikan sebagai modal kerja bagi perusahaan karena menambah nilai aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan sehingga memungkinkan perusahaan untuk beroperasi secara aman dan tidak mengalami kesulitan keuangan. Hal ini dapat dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2010 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.118.360.535	4.118.360.535
HARGA POKOK PENJUALAN	921.756.423	921.756.423
LABA KOTOR	3.196.604.112	3.196.604.112
BIAYA-BIAYA	1.884.232.868	2.230.388.220
LABA SEBELUM PAJAK	1.312.371.244	966.215.892
PAJAK PENGHASILAN	164.046.406	120.776.987
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.148.324.838</b>	<b>845.438.905</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 2. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2011 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.507.658.206	4.507.658.206
HARGA POKOK PENJUALAN	954.894.198	954.894.198
LABA KOTOR	3.552.764.008	3.552.764.008
BIAYA-BIAYA	2.313.178.899	2.680.269.611
LABA SEBELUM PAJAK	1.239.585.109	872.494.397
PAJAK PENGHASILAN	154.948.139	109.061.800
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.084.636.970</b>	<b>763.432.597</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 3. Dampak yang Terjadi Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2012 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Perencanaan Pajak	Setelah Perencanaan Pajak
PENDAPATAN	4.903.020.633	4.903.020.633
HARGA POKOK PENJUALAN	994.383.452	994.383.452
LABA KOTOR	3.908.637.181	3.908.637.181
BIAYA-BIAYA	2.509.978.555	2.902.119.667
LABA SEBELUM PAJAK	1.398.658.626	1.006.517.514
PAJAK PENGHASILAN	174.832.328	125.814.689
<b>LABA BERSIH</b>	<b>1.223.826.298</b>	<b>880.702.825</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 4. Data Hasil Penghitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

Keterangan	2010	2011	2012
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	164.046.406	154.948.139	174.832.328
Jumlah PPh setelah perencanaan pajak	120.776.987	109.061.800	125.814.689
<b>Penghematan pajak</b>	<b>43.269.419</b>	<b>45.886.339</b>	<b>49.017.639</b>

Sumber: data diolah, 2013

Jadi, selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang terjadi pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 43.269.419,00. Untuk tahun 2011, selisih yang terjadi karena penghematan pajak adalah sebesar Rp 45.886.339,00 dan untuk tahun 2012, selisih yang terjadi atas adanya penghematan pajak adalah sebesar Rp 49.071.639,00. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

#### 4.2. Proyeksi Perhitungan Pajak Tahun Mendatang

Berdasarkan hasil perhitungan tahun 2010, 2011, dan 2012 diketahui bahwa perusahaan dapat menghemat beban pajak, yaitu sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011 dan Rp 49.071.639,00 untuk tahun 2012. Namun perhitungan ini tidak memiliki pengaruh terhadap kompensasi pembayaran pajak untuk tahun 2013. Perhitungan ini hanya dijadikan sebagai pedoman bagi manajemen perusahaan apabila ingin melakukan perencanaan pajak dengan efektif dan menguntungkan bagi posisi keuangan perusahaan. Oleh karena itu peneliti akan mencoba membuat proyeksi penghematan pajak untuk tahun 2013 yang nantinya dapat dijadikan masukan untuk pelaporan pajak.

Dalam proyeksi penghematan pajak untuk tahun 2013 ini peneliti mengasumsikan bahwa pada laporan keuangan tahun 2013 tidak ada penambahan aktiva tetap dan biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan tetap. Berikut ini akan disajikan proyeksi laporan laba rugi tahun 2013:

Tabel 5. Proyeksi Laporan Laba Rugi Komersial PT. Citra Perdana Kendedes Malang 31 Desember 2013 (dalam Rupiah)

Sumber: data diolah, 2013

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan taksi		4.902.239.688
Bunga rekening		780.945
<b>Total Pendapatan</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>		
		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>		
Beban gaji	610.794.471	
Peralatan kantor	25.702.300	
Beban promosi	38.659.075	
Konsumsi	61.576.795	
Listrik dan telepon	80.280.351	
Beban asuransi	1.891.833	
Seragam kantor	9.818.493	
Perjalanan dinas	11.730.842	
Beban pengobatan	99.821.000	
Sumbangan	3.287.900	
Tunjangan beras	98.653.400	
Makan & transport karyawan	81.700.000	
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600	
Lain-lain	3.375.000	
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>	<b>2.754.301.060</b>
<b>LABA OPERASIONAL</b>		
		<b>1.154.336.121</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>		
		<b>(144.292.015)</b>
<b>LABA BERSIH</b>		
		<b>1.010.044.106</b>

Tabel 6. Proyeksi Daftar Aktiva Tetap dan Biaya Penyusutan Tahun 2013 (dalam Rupiah)

No	Aktiva tetap	Tahun perolehan	Harga perolehan	Biaya penyusutan yang terjadi selama tahun 2013			
				Menurut perusahaan	Menurut Undang-undang Perpajakan		
					Umur manfaat	Tarif	Penyusutan
1	Genset	1997	5.000.000	0	4 tahun	25%	0
2	Peralatan bengkel	1997	200.000.000	0	4 tahun	25%	0
3	Printer FC	1997	2.500.000	0	4 tahun	25%	0
4	Mesin tik 2 buah	1997	3.000.000	0	4 tahun	25%	0
5	Kursi lipat 30 buah	1999	4.500.000	0	4 tahun	25%	0
6	Bangunan	2000	600.000.000	30.000.000	20 tahun	5%	30.000.000
7	Meja kursi kary. 8 buah	2000	24.000.000	1.600.000	4 tahun	25%	0
8	Meja kursi direktur 2 buah	2000	40.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
9	AC	2000	2.000.000	0	4 tahun	25%	0
10	Telepon 4 buah	2000	2.400.000	0	4 tahun	25%	0
11	Faximile	2001	3.000.000	200.000	4 tahun	25%	0
12	Mobil soluna 2 buah	2001	250.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
13	Mobil soluna 10 buah	2002	1.300.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
14	Mobil soluna 10 buah	2002	1.400.000.000	0	8 tahun	12,5%	0
15	Mobil limo 20 buah	2002	3.700.000.000	0	4 tahun	25%	0
16	Peralatan dapur	2004	2.500.000	0	8 tahun	12,5%	0
17	Mobil soluna 12 buah	2004	1.800.000.000	180.000.000	8 tahun	12,5%	0
18	Kipas angin 5 buah	2004	3.200.000	0	4 tahun	25%	0
19	Mobil limo 14 buah	2005	2.800.000.000	280.000.000	8 tahun	12,5%	0
20	Pemadam kebakaran 3 buah	2005	1.500.000	150.000	4 tahun	25%	0
21	Komputer 8 buah	2007	20.000.000	2.500.000	4 tahun	25%	0
22	AC	2011	3.000.000	300.000	4 tahun	25%	750.000
23	Mobil limo 20 buah	2011	4.400.000.000	440.000.000	8 tahun	12,5%	550.000.000
24	Mobil limo 28 buah	2012	6.580.000.000	658.000.000	8 tahun	12,5%	822.000.000
25	Telepon 2 buah	2012	2.000.000	200.000	4 tahun	25%	5.000.000
26	Perangkat PABX	2012	10.000.000	1.000.000	8 tahun	12,5%	1.250.000
27	Komputer 2 buah	2012	10.000.000	1.250.000	4 tahun	25%	2.500.000
<b>Total</b>			<b>23.168.600.000</b>	<b>1.597.700.000</b>			<b>1.412.000.000</b>

Tabel 7. Proyeksi Perbandingan Besarnya Biaya Penyusutan Tahun 2013 Menurut Perusahaan dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 (dalam Rupiah)

4	Mesin Peralatan kantor	8.700.000	8.250.000	450.000
<b>Total</b>		<b>1.597.700.000</b>	<b>1.412.000.000</b>	<b>185.700.000</b>

Sumber: data diolah, 2013

No.	Jenis Aktiva Tetap	Penyusutan komersial	Penyusutan fiskal	Selisih
1	Bangunan	30.000.000	30.000.000	0
2	Kendaraan	1.558.000.000	1.372.500.000	183.500.000
3	(mobil)	1.000.000	1.250.000	-250.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa terdapat selisih positif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan yaitu

lebih besar dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 185.700.000,00 pada tahun 2013. Hal ini disebabkan adanya pengelompokan harta yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, ketika penulis akan membuat proyeksi rekonsiliasi laporan laba rugi perusahaan, akan dilakukan pengurangan biaya sebesar selisih tersebut pada koreksi fiskal untuk biaya penyusutan.

Selain proyeksi laporan laba rugi komersial, berikut ini juga akan disajikan proyeksi laporan laba rugi fiskal yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2013.

Tabel 8. Proyeksi Laporan Laba Rugi Fiskal PT. Citra Perdana Kenedes Malang 31 Desember 2013 (dalam Rupiah)

<b>PENDAPATAN</b>		
Pendapatan taksi		4.902.239.688
Bunga rekening		780.945
<b>Total Pendapatan</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>		
		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>		
		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>		
Beban gaji	610.794.471	
Peralatan kantor	25.702.300	
Beban promosi	-	
Konsumsi	-	
Listrik dan telepon	80.280.351	
Beban asuransi	1.891.833	
Seragam	-	
Perjalanan dinas	-	
Beban pengobatan	-	
Sumbangan	-	
Tunjangan beras	-	
Makan & transport karyawan	-	
Beban penyusutan aktiva	1.412.000.000	
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600	
Lain-lain	-	
<b>Total Biaya</b>	<b>2.159.978.555</b>	<b>2.159.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>		
		<b>1.748.658.626</b>

Sumber: data diolah, 2013

Dengan strategi perencanaan pajak yang telah diuraikan pada tahapan strategi perencanaan pajak, maka besarnya pajak yang akan ditanggung oleh perusahaan setelah melakukan perencanaan pajak akan berbeda dengan sebelum melakukan perencanaan pajak. Berikut ini akan disajikan proyeksi laporan laba rugi sebelum dan setelah melakukan perencanaan pajak:

Tabel 9. Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut Akuntansi Komersial dan Fiskal Sebelum Perencanaan Pajak Tahun 2013 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
------------	-----------	----------------	--------

<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>			
	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075	38.659.075	-
Konsumsi	61.576.795	61.576.795	-
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842	11.730.842	-
Beban pengobatan	99.821.000	99.821.000	-
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400	98.653.400	-
Makan & transport karyawan	81.700.000	81.700.000	-
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	185.700.000	1.412.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>		<b>2.159.978.555</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>			
	<b>1.154.336.121</b>		<b>1.748.658.626</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>			
	144.292.015		218.582.328
<b>LABA BERSIH</b>			
	<b>1.010.044.016</b>		<b>1.530.076.298</b>

Sumber: data diolah, 2013

Tabel 10. Proyeksi Perbedaan Pengakuan Biaya Menurut akuntansi Komersial dan Fiskal Setelah Perencanaan pajak Tahun 2013 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL	FISKAL
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan taksi	4.902.239.688		4.902.239.688
Bunga rekening	780.945		780.945
<b>Total Pendapatan</b>	<b>4.903.020.633</b>		<b>4.903.020.633</b>
<b>HARGA POKOK PENJUALAN</b>			
	<b>994.383.452</b>		<b>994.383.452</b>
<b>LABA KOTOR</b>			
	<b>3.908.637.181</b>		<b>3.908.637.181</b>
<b>BIAYA-BIAYA</b>			
Beban gaji	610.794.471		610.794.471
Peralatan kantor	25.702.300		25.702.300
Beban promosi	38.659.075		38.659.075
Konsumsi	61.576.795		61.576.795
Listrik dan telepon	80.280.351		80.280.351
Beban asuransi	1.891.833		1.891.833
Seragam	9.818.493	9.818.493	-
Perjalanan dinas	11.730.842		11.730.842
Beban pengobatan	99.821.000		99.821.000
Sumbangan	3.287.900	3.287.900	-
Tunjangan beras	98.653.400		98.653.400
Makan & transport karyawan	81.700.000		81.700.000
Beban penyusutan aktiva	1.597.700.000	185.700.000	1.412.000.000
Beban pemeliharaan aktiva	29.309.600		29.309.600
Lain-lain	3.375.000	3.375.000	-
<b>Total Biaya</b>	<b>2.754.301.060</b>		<b>2.552.119.667</b>
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>			
	<b>1.154.336.121</b>		<b>1.356.517.514</b>
<b>PAJAK PENGHASILAN</b>			
	144.292.015		169.564.689
<b>LABA BERSIH</b>			
	<b>1.010.044.106</b>		<b>1.186.952.825</b>

Sumber: data diolah, 2013

Penghitungan besarnya proyeksi pajak penghasilan terutang yang akan ditanggung oleh PT. Citra Perdana Kenedes Malang setelah dilakukan perencanaan pajak disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 11. Proyeksi Penghitungan Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak Tahun 2013 (dalam Rupiah)

Keterangan	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
<b>Laba sebelum pajak (komersial)</b>	<b>1.154.336.121</b>	<b>1.154.336.121</b>
<b>Koreksi fiskal:</b>		
Beban promosi	38.659.075	0
Konsumsi	61.576.795	0
Seragam kantor	9.818.493	9.818.493
Perjalanan dinas	11.730.842	0
Beban pengobatan	99.821.000	0
Sumbangan	3.287.900	3.287.900
Tunjangan beras	98.653.400	0
Makan & transport karyawan	81.700.000	0
Beban penyusutan aktiva	185.700.000	185.700.000
Biaya lain-lain	3.375.000	3.375.000
<b>Laba Bersih Kena Pajak</b>	<b>1.748.658.626</b>	<b>1.356.517.514</b>
<b>Pajak penghasilan ((50% x 25%) x laba bersih kena pajak)</b>	<b>218.582.328</b>	<b>169.564.689</b>

Sumber: data diolah, 2013.

Dari hasil proyeksi penghitungan pajak yang telah dilakukan di atas, maka terdapat perbedaan hasil antara penghitungan yang menggunakan perencanaan pajak dengan yang tidak menggunakan perencanaan pajak. Perbedaan ini akan disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 12. Data Hasil Penghitungan Pajak Sebelum dan Setelah Perencanaan Pajak (dalam Rupiah)

Keterangan	2013
Jumlah PPh sebelum perencanaan pajak	218.582.328
Jumlah PPh setelah perencanaan pajak	169.564.689
<b>Penghematan pajak</b>	<b>49.017.639</b>

Sumber: data diolah, 2013

Berdasarkan proyeksi perhitungan diatas, diketahui bahwa untuk tahun 2013 perusahaan dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 49.017.639,00. Selisih ini nantinya dapat digunakan oleh perusahaan untuk penambahan kas yang berguna bagi tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat selisih negatif antara biaya penyusutan aktiva tetap yang diakui oleh perusahaan, yaitu lebih kecil dari biaya penyusutan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku sebesar Rp 59.397.500 pada tahun 2010, Rp 455.587.500,00 pada tahun 2011, dan Rp 184.037.500,00 pada tahun 2012.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut data yang diperoleh dari laporan keuangan PT. Citra Perdana Kendedes Malang terdapat beberapa biaya yang tidak termasuk dalam biaya fiskal (*non deductible cost*), yaitu beban promosi, konsumsi, seragam kantor, perjalanan dinas, biaya pengobatan, sumbangan, tunjangan beras, biaya

makan dan transport karyawan, dan biaya lain-lain.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi perpajakan perusahaan masih kurang efisien karena masih terdapat komponen biaya yang seharusnya dapat digunakan perusahaan untuk menghemat pajak namun tidak dimanfaatkan oleh perusahaan. Biaya yang dimaksud adalah biaya promosi, konsumsi, biaya pengobatan, tunjangan beras, dan biaya makan dan transport karyawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan perencanaan pajak terdapat selisih beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang cukup besar, yaitu sebesar Rp 43.269.419,00 untuk tahun 2010, sebesar Rp 45.886.339,00 untuk tahun 2011, dan sebesar Rp 49.017.639,00 untuk tahun 2012. Selisih ini merupakan penambahan kas yang dapat digunakan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

### 5.2. Saran

Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan peluang yang ada untuk mencapai penghematan pajak penghasilan semaksimal mungkin. Peluang yang masih bias dimanfaatkan adalah dengan mengubah *non deductible cost* menjadi *deductible cost*. Hal ini dapat dilakukan dengan mengubah kebijakan pemberian imbalan dalam bentuk kenikmatan atau natura diubah menjadi pemberian dalam bentuk tunjangan tunai.

Diharapkan pihak perusahaan dapat memanfaatkan selisih dari beban pajak penghasilan (penghematan pajak) yang terjadi pada tahun 2010, 2011, dan 2012 yang merupakan penambahan kas yang dapat digunakan perusahaan sebagai tambahan modal kerja bagi pengembangan perusahaan.

Diharapkan pihak perusahaan selalu mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru agar dapat terhindar dari kesalahan yang dianggap sebagai penggelapan yang berakibat merugikan bagi perusahaan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Chrisdianto, R.B. dan Andrianto. 2009. Penerapan Tax Planning dalam Pengambilan Keputusan Terhadap Pilihan Alternatif Pembelian Truk Secara Tunai, Kredit Bank, dan Leasing dengan Hak Opsi pada PT. Rajawali Dwi Putra Indonesia. *Bisnis Perspektif*, 1(1): 7.

- Lumbantoruan, Shopar. 1996. *Akuntansi Pajak*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Nazir, Mohammad. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prabowo, Yudianto. 2004. *Akuntansi Perpajakan Terapan*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Singarimbun, Masridan Sofyan Effendi. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Suandy, Erly. 2003. *Perencanaan Pajak Revisi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Tjahjono, Achmad dan M.F. Husein. 2005. *Perpajakan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Undang-undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas undang-undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Jogjakarta: Bening.
- Waluyo dan Wirawan B. Ilyas. 2002. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba.
- Zain, Muhammad. 2003. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: SalembaEmpat.